

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK		HUKUM TATA NEGARA	
SKS	3	SEMESTER	3
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	Meima, S.H., M.Hum. Dani Durahman, S.H., M.H. Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religious 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum.	
	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik 2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter 	
RUMUSAN CAPAIAN	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian dan ruang lingkup hukum tata Negara, sumber-sumber hukum tata		

PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	Negara dan hierarki perundang-undangan di Indonesia Mahasiswa memiliki pengetahuan, dan pemahaman tentang Perjanjian Ekstradisi Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Asas-asas ketatanegaraan di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan ruang lingkup hukum tata Negara, sumber-sumber hukum tata Negara, asas-asas hukum tata Negara Indonesia, hierarki perundang-undangan di Indonesia serta perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, lembaga-lembaga Negara, HAM dan pemilu di Indonesia.
METODE PEMBELAJARAN	<i>Discovery Learning</i> <i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i> <i>Contextual Teaching and Learning</i>
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	Pemaparan materi, tanya jawab, diskusi , Persentasi Tugas
REFERENSI	<ul style="list-style-type: none"> • Rozikin Daman, Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar), Raja Grafindo, Jakarta, 1993 • Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 • M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandar Maju, Bandung, 1992 • Joeniarto, Pandangan Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara DI Indonesia,Cetakan 1,Yogyakarta,Liberty, 1991 • Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara, Refika Aditama, Bandung, 2011 • Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 • UUD Republik Indonesia Tahun 1945 • UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD • UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung • UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi • UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan • UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah:		Hukum Tata Negara	Kode:		SKS: 3	Sem: 3	
Dosen Pengampu:		Meima, S.H., M.Hum. Dani Durahman, S.H., M.H. Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan ruang lingkup hukum tata Negara, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum tata Negara dan hierarki perundang-undangan di Indonesia Mahasiswa memiliki pengetahuan, dan pemahaman tentang Perjanjian Ekstradisi Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Asas-asas ketatanegaraan di Indoneisa Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia					
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu menerapkan pengertian dan ruang lingkup Hukum Tata Negara	Membahas RPS, Tujuan, ruang lingkup dan Pengertian-pengertian Hukum Tata Negara	<i>Discovery Learning</i>	3x50	Pemaparan materi, dan Tanya jawab	Ketepatan dan penguasaan : menerapkan Tujuan ruang lingkup dan Pengertian-pengertian Hukum Tata Negara	

2	Mahasiswa dapat menggambarkan Sumber-sumber Hukum Tata Negara dan hierarki Perundang-undangan di Indonesia	Sumber-sumber Hukum Tata Negara dan hierarki Perundang-undangan di Indonesia	<i>Discovery Learning</i>	3x50	Pemaparan materi dan tanya jawab	Ketepatan dan penguasaan : menggambarkan Sumber-sumber Hukum Tata Negara dan hierarki Perundang-undangan di Indonesia	
3	Mahasiswa mampu menggambarkan tentang Sejarah perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia	Sejarah perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia	<i>Discovery Learning</i>	3x50	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Ketepatan dan penguasaan : menggambarkan Sejarah perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia	
4	Mahasiswa dapat menerapkan Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia	Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	3x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan penguasaan dalam menerapkan Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia	
5	Mahasiswa mampu mengemukakan istilah dan beberapa pengertian Konstitusi, Nilai dan Sifat Konstitusi, serta Sejarah Undang-Undang Dasar Indonesia	Istilah dan beberapa pengertian Konstitusi, Nilai dan Sifat Konstitusi, serta Sejarah Undang-Undang Dasar Indonesia	<i>Discovery Learning</i>	3x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan penguasaan dalam mengemukakan istilah dan beberapa pengertian Konstitusi, Nilai dan Sifat Konstitusi, serta Sejarah Undang-Undang Dasar	

						Indonesia	
6	Mahasiswa mampu menguraikan Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan menurut Sifatnya dan menurut Pembagian Kekuasaan	Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan menurut Sifatnya dan menurut Pembagian Kekuasaan	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	3x50	Tugas persentasi	Ketepatan dalam menguraikan Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan menurut Sifatnya dan menurut Pembagian Kekuasaan	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Lembaga-lembaga Negara	Lembaga-lembaga Negara sebelum dan sesudah Perubahan Perundang-undangan	<i>Small Group Discussion dan Cooperative Learning</i>	3x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Lembaga-lembaga Negara	
8	UTS						
9	Mahasiswa mampu menerapkan proses terjadinya perjanjian Ekstradisi, Negara yang menjalin perjanjian dengan Indonesia	Kronologi perjanjian Ekstradisi di Indonesia, pendapat dan pandangan Ahli Hukum	<i>Discovery Learning</i>	3x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Mahasiswa mampu menerapkan proses terjadinya perjanjian Ekstradisi, Negara yang menjalin perjanjian dengan Indonesia	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kewarganegaraan	Kewarganegaraan	<i>Discovery Learning</i>	3x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan penguasaan, sistematika dan kesesuaian dengan Undang-undang	
11-12	Mahasiswa mampu menggambarkan tentang Sistem Pemilihan Umum berkaitan dengan Hubungan	Sistem Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x3x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan penguasaan, sistematika dan kesesuaian dengan	

	Pemili dan Kedaulatan Rakyat serta Pemilihan Kepala Daerah					Undang-undang	
13-14	Mahasiswa mampu mengemukakan tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x3x50	Tugas Persentasi dengan Tema.....	Ketepatan penguasaan, kesesuaian dengan regulasi dan kemampuan analisis	
15	Mahasiswa mampu menyesuaikan mengenai Hak Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia	<i>Small Group Discussion dan Cooperative Learning</i>	3x50	Tayangan persentasi mahasiswa, Tanya jawab dan diskusi	Ketepatan analisis kasus terkait tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia	
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rozikin Daman, Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar), Raja Grafindo, Jakarta, 1993 • Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 • M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandar Maju, Bandung, 1992 • Joeniarto, Pandangan Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara DI Indonesia, Cetakan 1, Yogyakarta, Liberty, 1991 • Mexasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara, Refika Aditama, Bandung, 2011 • Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 • UUD Republik Indonesia Tahun 1945 • UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD • UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung • UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi • UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan • UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 					